

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata Ulama berasal dari bahasa Arab, Ulama adalah jamak dari kata '*alim*' atau '*ulama*' artinya yang mengetahui atau berilmu<sup>1</sup> yang berarti seseorang yang memiliki ilmu mendalam, luas dan mantap.<sup>2</sup> Syarat menjadi ulama ialah mempunyai ilmu agama yang mendalam, kemudian mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah dengan menjadi pelindung, Pembela dan pelayan umat (waliyul mukminin) dan mempunyai akhlak atau kepribadian yang mulia. Sedangkan fungsinya ialah dakwah, pengajian Islam serta pengembangan dan perlindungan untuk melakukan pembelaan terhadap Islam dan umat Islam.

Agar tujuan ulama di Indonesia bisa sejalan, maka Indonesia membentuk sebuah wadah yang disebut sebagai MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.<sup>3</sup> Tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, madzhab, atau aliran keagamaan yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia* ( Jakarta :PT. Hidakarya agung,1990).278.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama' Dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam Di Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994), 3.

<sup>3</sup> Wikipedia, "majlis ulama Indonesia", dalam [http://ms.wikipedia.org/wiki/majlis ulama indonesia](http://ms.wikipedia.org/wiki/majlis_ulama_indonesia) (30 januari 2008)

MUI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M,<sup>4</sup> dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan serta tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.<sup>5</sup> Dapat diketahui bahwa sebelum MUI pusat didirikan, maka majelis ulama daerah terlebih dahulu sudah ada, hal tersebut dapat ditemukan pada arsip kantor MUI kota Surabaya yang tertulis dengan jelas bahwa MUI kota Surabaya didirikan pada tanggal 17 Januari 1975.<sup>6</sup> di Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya.

Pada periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi majelis 'ulama Indonesia.

Kepengurusan di setiap jenjang berlangsung selama lima tahun, sampai saat ini (tahun 2005), MUI telah menyelenggarakan enam kali musyawarah nasional (MUNAS) yang antara lain memilih kepengurusan baru, dan sampai saat ini kepengurusan tingkat pusat telah terselenggara dalam enam periode untuk kepengurusan MUI propinsi Jawa Timur, mengalami enam periode, begitu pula kepengurusan MUI kota Surabaya.

Hubungan organisasi antara MUI pusat dengan MUI propinsi dengan MUI Kab/Kota, antara MUI Kab/Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 65.

<sup>5</sup> Sekretariat Majelis Ulama' Indonesia Kota Surabaya, *Sejarah Singkat Visi, Misi, Orientasi, Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama' Indonesia* (Surabaya:2005), 1.

<sup>6</sup> Imam Suyuti, *Wawancara*, Surabaya, 01 April 2009.

bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

MUI adalah wadah musyawarah, bukan ormas, MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan, MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas Islam atau lembaga Islam.

Pada umumnya para ulama dan para kiai mempunyai pengaruh yang sangat besar, dalam menjangkau perspektif pembangunan politik di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya, para ulama sangat berperan. Peranan itu meliputi suatu wawasan yang sangat luas lagi pula kompleks dalam rangka pergaulan hidup bangsa Indonesia di bidang kemasyarakatan maupun di bidang kenegaraan.<sup>7</sup>

Pada awal pemerintahan Orde Baru, hubungan umat Islam dengan pemerintah mengalami kerenggangan.<sup>8</sup> Setelah MUI dibentuk, hubungan antara umat Islam dengan pemerintah mulai membaik, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan mulus karena hubungan mengalami kembang kempis tiap periode yang diduga karena sejak awal berdirinya MUI ketika itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (social engineering), yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai

---

<sup>7</sup> Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia* (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1987), 235.

<sup>8</sup> Tabloid suara, "MUI setelah 31 tahun berkiprah", dalam [http://www.suaraIslam.com/index.php?option=com\\_content & task =view&id=1086&itemid=86](http://www.suaraIslam.com/index.php?option=com_content & task =view&id=1086&itemid=86) (26 Januari 2008)

politik melalui fusi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. maka kehadiran MUI dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan kiprah umat Islam.<sup>9</sup>

Orientasi atau yang disebut sebagai hal mencari pedoman,<sup>10</sup> MUI di sini mempunyai sembilan orientasi yakni diniyah, irsyadiyah, istijabiyah, hurriyah, ta'awuniyah, syuriyah, tasamuh, qudwah dan addualiyah.<sup>11</sup>

Dalam perkembangan terakhir, paling tidak dalam lima tahun belakangan, MUI lebih menampilkan sosok organisasi semi pemerintah. Seperti halnya organisasi, maka dalam MUI juga terdapat AD/ART yang telah disahkan oleh musyawarah nasional ke 1 MUI pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

Berdasarkan pandangan di atas maka skripsi yang berjudul “Perkembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Surabaya (1975-1992)”, diharapkan dapat menguak berbagai segi tentang peranan MUI yang ada di kota Surabaya tersebut.

Pada tahun 1975-2008, terjadi beberapa pergantian ketua umum dan perubahan dalam komposisi kepengurusan, awal berdirinya MUI kota Surabaya dipimpin oleh KH. Moenawar Djailani sampai tiga periode. pada periode empat dipimpin oleh Drs. KH. Moch. Hasan As, kemudian digantikan oleh Drs. KH.

---

<sup>9</sup> Sekretariat MUI Kota Surabaya, ....., 3.

<sup>10</sup> Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola), 548.

<sup>11</sup> Muhammad Hamzah, “orientasi dan peran MUI”, dalam <http://mhamzah.multiply.com/journal/item/395> (06 januari 2008

Muchibbudin Abbas, M.Hum, setelah itu digantikan oleh Drs. KH. M. Ischak Iskandra, SH, MSC.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya MUI di Surabaya?
2. Bagaimana perkembangan kepengurusan MUI Surabaya tahun 1975-1992?
3. Bagaimana perkembangan program dan pelaksanaan MUI kota Surabaya tahun 1975-1992?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya MUI di Surabaya
2. Untuk mengetahui perkembangan kepengurusan MUI Surabaya tahun 1975-1992
3. Untuk mengetahui perkembangan program dan pelaksanaan MUI kota Surabaya tahun 1975-1992

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memperkaya khazanah Islam agar menjadi bacaan yang berguna bagi masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mengetahui tentang peran MUI terhadap masyarakat Surabaya pada tahun 1975-1992
2. Sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya, khususnya dalam bidang studi keislaman dan umumnya pada masalah yang terkait.

3. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan penulis dalam bidang yang ada hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna memenuhi tugas akhir (skripsi).

#### **E. Pendekatan dan Kerangka Teori**

Penelitian skripsi yang berjudul “Perkembangan Majelis ‘Ulama Indonesia (MUI) kota Surabaya (1975-1992)”, penulis menggunakan pendekatan historis. Dalam hal ini penulis berusaha mengungkapkan bagaimana latar belakang berdirinya MUI serta peranannya baik dalam bidang politik, sosial maupun pendidikan.

Dalam studi sejarah ini, penulis berusaha menggunakan perspektif teoritis sebagai kerangka analisis terhadap fenomena-fenomena sejarah yang dikaji. Penggunaan disiplin keilmuan yang lain dalam studi ini seperti politik dan sosiologi sangat penting dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah peristiwa-peristiwa adanya MUI lahir, sehingga peristiwa sejarah dapat dieksplorasi secara kritis dan mendalam. Dalam studi perkembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Surabaya (1975-1992), penulis menggunakan teori *change in continuity* yakni suatu perubahan yang masih berkelanjutan yang di kemukakan oleh Oswald Spengler.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bugiono dan P.K. Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 83.

Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.<sup>13</sup>

Konsep perubahan sosial meliputi atom terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau perubahan setiap aspeknya. Tetapi, perubahan tunggal jarang terjadi dalam keadaan terisolasi. Perubahan itu biasanya berkaitan dengan aspek lain dan sosiologi harus menemukan konsep yang lebih kompleks untuk menganalisis bentuk-bentuk yang berkaitan.<sup>14</sup>

Perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar, gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner. Proses perubahan sosial meliputi: *Proses reproduction* yaitu proses mengulang-ulang menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang. Adapun warisan budaya dalam kehidupan keseharian meliputi:

- a. Material (kebudayaan, teknologi)
- b. Immaterial (non benda, adat, norma, dan lain-lain).

*Proses transformation* yaitu proses penciptaan hal yang baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berubah adalah aspek budaya yang sifatnya material, sedangkan yang sifatnya norma dan nilai sulit sekali diadakan perubahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), 305.

<sup>14</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenata, 2004), 6.

<sup>15</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 20-21.

Oswald Spengler mengemukakan bahwa sejarah sebagai perkembangan sesuai dengan peraturan-peraturan perubahan yang tetap dan selalu kembali seperti dalam suatu lingkaran.<sup>16</sup>

## F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian yang pernah dilakukan mengenai majelis ulama Indonesia (MUI) adalah :

- Skripsi oleh Zakariyah berjudul “Majelis ‘Ulama Indonesia Jawa Timur (Studi Tentang Sejarah Berdirinya Dan Perkembangan Di Jawa Timur Periode 1975-1995), Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya : 1998

Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada MUI Jatim.

- Skripsi oleh Susiati berjudul “KH. Misbah dan Peranannya dalam MUI Jatim, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya : 2004

Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada biografi KH. misbah dan peranannya dalam MUI Jatim.

- Skripsi oleh Subairi berjudul “Kepemimpinan Hamka dalam MUI tahun 1975-1981, Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya : 2004

Dalam skripsi ini lebih ditekankan pada biografi Hamka dan perjalanan dalam memimpin MUI pertama kali.

---

<sup>16</sup> Rustam E. Tamboraka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 157.



Dalam hal ini penulis tidak menemukan baik buku, skripsi maupun tesis yang meneliti tentang MUI yang ada di kota Surabaya.

## **G. Metode Penelitian**

1. Heuristik yaitu berasal dari kata Yunani Heurishein, yang artinya memperoleh.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh sumber dari wawancara terhadap Ir. Imam Suyuti salah satu pengurus MUI kota Surabaya.

Sedangkan sumber yang berupa dokumen atau sumber tertulis seperti halnya laporan pertanggung jawaban, surat keterangan berdirinya MUI dan surat keputusan pembentukan kepengurusan dapat ditemukan pada sekretariat Majelis Ulama Indonesia kota Surabaya. Tepatnya di kota madya samping masjid al-Muhajirin.

2. Kritik dilakukan untuk memperoleh keabsahan sumber.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis mencoba memadukan hasil interview dengan sumber tertulis bahwa di situ belum ditemukan kerancuan yakni sumber-sumbernya dapat dipastikan keabsahannya. Dengan itu penulis melakukan kritik dikarenakan masih perlu mengoreksi kebenaran baik dari sejarahnya maupun dari dokumen itu sendiri.
3. Interpretasi, dalam hal ini ada dua metode yang dipergunakan yaitu analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatakan.<sup>19</sup> Setelah data terkumpul

---

<sup>17</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Ombak, 2007), 86.

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), 70.

<sup>19</sup> *Ibid*, 73.

dan dibandingkan lalu disimpulkan untuk ditafsirkan sehingga dapat diketahui kausalitas dan kesesuaian dengan masyarakat yang dibahas.

#### 4. Historiografi

Sebagai tahap terakhir dalam metode sejarah, historiografi adalah penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan layaknya laporan penelitian ilmiah, penulis mencoba menuangkan penelitian sejarah ke dalam satu karya yang berupa skripsi.

Penulisan ini diharapkan memberitakan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal hingga akhir mengenai “Perkembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Surabaya (1975-1992)”.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Pendahuluan, pada bab satu menggambarkan secara global dari keseluruhan isi skripsi yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab dua, mengungkapkan mengenai sejarah berdirinya MUI di kota Surabaya dengan rincian latar belakang berdirinya MUI kota Surabaya dan perkembangan susunan pengurus mulai periode satu sampai tiga.

Bab tiga membahas mengenai perkembangan kepengurusan MUI di kota Surabaya mulai periode satu (1975-1982), periode dua (1982-1987), dan periode tiga (1988-1992).

Pada bab empat menjelaskan mengenai perkembangan program dan pelaksanaan MUI kota Surabaya baik di bidang organisasi atau sekretariat, bidang fatwa dan hukum, bidang Ukhuwah Islamiyah, pendidikan dan dakwah, bidang kerukunan antar umat beragama dan kerjasama ulama, bidang pembinaan generasi muda, bidang penelitian dan pengembangan, bidang pembangunan, bidang peranan wanita, bidang lain-lain atau umum, bidang pendanaan dan hasil yang dicapai dan program yang terlaksana.

Bab lima, yaitu bab yang terakhir atau disebut penutup, memberikan sebuah kesimpulan mengenai MUI yang ada di kota Surabaya kemudian dilanjutkan dengan adanya saran.